



Yogyakarta tak Dapat Kuota CPNS 2013

Yullaningsih

Jumlah PNS di Kota Yogyakarta saat ini mencapai 7.833 orang.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dipastikan tidak memperoleh kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN). Hal itu karena anggaran belanja pegawai pemkot yang lebih 50 persen dari APBD.

"Kita tidak mendapat kuota, terakhir 2010 lalu," ujar Ari Sulistyoni, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Senin (22/7).

Sebenarnya, sambung dia, tahun ini pemkot Yogyakarta mengusulkan kekurangan PNS sebesar 2.000 orang. Namun pemkot tetap saja tidak mendapat kuota CPNS lantaran anggaran belanja pegawai yang lebih dari 50 persen APBD.

Jumlah PNS di Kota Yogyakarta saat ini mencapai 7.833 orang. "Upaya untuk mengatasi kekurangan pegawai adalah dengan peningkatan kompetensi sehingga bisa bekerja lebih maksimal. Selain itu, juga peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pegawai," katanya.

Meski tidak memperoleh kuota CPNS baru, lanjutnya, namun pemkot Yogyakarta memperoleh kuota untuk seleksi CPNS dari tenaga honorar.

Adapun tenaga honorar yang berhak mengikuti seleksi CPNS adalah yang sudah bekerja setahun pada Desember 2005 lalu. Seleksi CPNS untuk tenaga honorar akan dilakukan pada pekan keempat September.

Materi tes yang akan diujikan dalam seleksi CPNS dari honorar tersebut adalah tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Tes dilakukan dengan lembar jawab komputer dan bukan dengan sistem "computer assisted test" (CAT).

Kasubid Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kota Yogyakarta, May Indra menambahkan, jumlah tenaga honorar yang berhak mengikuti ujian seleksi CPNS ini adalah sebanyak 662 orang.

"Secara nasional, jumlah honorar yang akan diterima adalah 30 persen. Namun, kepastian berapa jumlah yang diterima di pemerintah kota Yogyakarta belum diketahui," katanya.

Pihaknya juga belum mengetahui tenaga honorar yang tidak lolos seleksi selanjutnya tetap menjadi honorar atau bagaimana. "Kita menunggu keputusan pemerintah," kata dia.

Sebagian besar honorar yang akan mengikuti seleksi adalah guru. Mengenai persiapan pelaksanaan seleksi, Indra menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebatas pelaksana dari pusat.

"Seluruh konsep dan penyusunan soal dilakukan pusat. Begitu juga koreksinya. Kami sebatas pelaksana di daerah," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Maman Permana mengatakan pemkab menargetkan perampingan struktur organisasi dari 44

menjadi 31 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selesai pada 2015 mendatang.

"Kami saat ini masih fokus untuk perampingan SKPD, kami targetkan dari semula 44 menjadi 31 SKPD hingga 2015," ujar dia.

Menurutnya, perampingan struktur organisasi di lingkungan kerja pemkab Bantul tersebut sebagai upaya efisiensi anggaran, karena hingga akhir 2012 belanja pegawai negeri sipil (PNS) masih tinggi, mencapai 67 persen dari APBD.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BKD, kata dia, dengan perampingan ini minimal pemkab bisa menghemat anggaran Rp 30 miliar bagi belanja pegawai tiap tahun, atau setidaknya beban anggaran menurun hingga di bawah 50 persen.

Maman menjelaskan, awalnya belanja pegawai dalam APBD di Bantul sebesar 72 persen, namun setelah pemkab berusaha melakukan efisiensi termasuk tidak merekrut CPNS akhirnya pada 2012 dapat turun sekitar lima persen menjadi 67 persen. ■ antara ed. yusaningsih

1. BKD
 - Netral
 - Segera
 - Untuk diketahui

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Kepala

Ttd

Ig_Trihastono_S.Sos_MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005